

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia memainkan peran yang sangat penting dalam ekonomi kedua negara. Sejak lama, Malaysia menjadi salah satu destinasi utama bagi TKI karena kebutuhan tinggi akan tenaga kerja di sektor-sektor seperti konstruksi, perkebunan, dan jasa rumah tangga¹. Keberadaan TKI tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Malaysia, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian Indonesia melalui remitansi yang dikirimkan ke tanah air. Remitansi dari TKI merupakan sumber devisa yang signifikan bagi Indonesia, membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup keluarga TKI².

Berdasarkan data dari Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, ada ratusan ribu TKI yang bekerja di Malaysia setiap tahunnya. Jumlah ini menunjukkan betapa pentingnya Malaysia sebagai negara tujuan bagi para pekerja migran Indonesia³. Selain itu, hubungan antara kedua negara dalam konteks tenaga kerja migran juga telah lama terjalin dan menjadi salah satu aspek utama dalam hubungan bilateral⁴.

Selain kontribusi ekonomi, TKI juga berperan dalam menjembatani budaya antara Indonesia dan Malaysia. Banyak TKI yang bekerja di Malaysia tidak hanya membawa keterampilan dan tenaga mereka, tetapi juga budaya dan tradisi Indonesia. Hal ini menciptakan interaksi budaya yang positif antara masyarakat kedua negara dan memperkuat hubungan diplomatik yang telah terjalin sejak lama (Susilo, 2020; Ananta, 2018).

¹ Sukamdi, A. (2020). Remittances and Household Welfare in Indonesia. *Asian Journal of Social Science*, 48(4), 267-289.

² World Bank. (2021). *Migration and Remittances: Recent Developments and Outlook*. Washington, DC: World Bank.

³ Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. (2015). *Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja Indonesia-Malaysia*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Indonesia.

⁴ Yuniarto, T. (2019). Bilateral Cooperation on Migrant Worker Protection Between Indonesia and Malaysia. *International Journal of Migration Studies*, 13(1), 44-63.

Namun, pentingnya TKI di Malaysia tidak terlepas dari berbagai tantangan yang mereka hadapi⁵. Kondisi kerja yang kadang tidak memadai, upah yang rendah, dan perlakuan diskriminatif adalah beberapa masalah yang sering dihadapi oleh TKI. Meskipun demikian, banyak TKI yang tetap memilih untuk bekerja di Malaysia karena peluang ekonomi yang lebih baik dibandingkan di Indonesia⁶.

Kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam mengelola TKI sangat penting untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja migran. Kedua negara telah menandatangani beberapa perjanjian bilateral yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan bagi TKI di Malaysia⁷. Perjanjian-perjanjian ini mencakup aspek-aspek seperti kondisi kerja, upah minimum, dan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan.

Sebagai contoh, Perjanjian Kerjasama Tenaga Kerja yang ditandatangani pada tahun 2015 memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai hak dan kewajiban TKI dan majikan di Malaysia⁸. Perjanjian ini juga mencakup mekanisme penyelesaian sengketa dan akses terhadap perlindungan hukum bagi TKI. Pentingnya TKI di Malaysia juga tercermin dalam kontribusi mereka terhadap sektor-sektor kunci dalam perekonomian Malaysia. Di sektor konstruksi, misalnya, TKI memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur yang vital bagi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Begitu pula di sektor perkebunan, terutama dalam industri kelapa sawit, keberadaan TKI sangat krusial dalam memastikan kelangsungan produksi dan ekspor yang menjadi andalan ekonomi Malaysia⁹.

Kontribusi TKI tidak hanya berhenti pada aspek ekonomi saja. Mereka juga membawa nilai-nilai sosial dan budaya yang memperkaya masyarakat Malaysia¹⁰.

⁵ Rahman, M. (2021). Indonesian Migrant Workers in Malaysia: A Socioeconomic Analysis. *Journal of Indonesian Social Sciences*, 10(2), 188-203.

⁶ Hamid, A. (2019). The Plight of Indonesian Domestic Workers in Malaysia. *Human Rights Review*, 20(2), 210-225.

⁷ Malaysian Ministry of Foreign Affairs. (2016). *Malaysia-Indonesia Memorandum of Understanding on Labour Cooperation*. Kuala Lumpur: Ministry of Foreign Affairs.

⁸ Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. (2022). *Statistik Penempatan TKI Tahun 2022*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja Indonesia.

⁹ International Labour Organization (ILO). (2020). *Migrant Workers and Remittances: Key Issues and Opportunities*. Geneva: International Labour Organization.

¹⁰ Ananta, A. (2018). The Role of Migrant Workers in Malaysia's Economy. *Journal of Southeast Asian Studies*, 49(3), 123-145.

Interaksi antara TKI dan masyarakat lokal membantu memperkuat ikatan sosial dan meningkatkan pemahaman budaya di antara kedua negara. Hal ini menjadi landasan penting dalam membangun hubungan bilateral yang lebih harmonis dan saling menguntungkan¹¹. Meskipun demikian, pentingnya kontribusi TKI seringkali tidak diimbangi dengan perlindungan yang memadai. Banyak TKI yang masih menghadapi kondisi kerja yang tidak adil dan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia dan Malaysia untuk terus memperkuat kerjasama dalam melindungi hak-hak TKI dan memastikan mereka mendapatkan perlakuan yang layak¹².

Peran yang penting dalam perekonomian Malaysia, TKI sering menghadapi berbagai masalah perlindungan yang serius. Salah satu masalah utama yang dihadapi oleh TKI adalah eksploitasi oleh majikan. Banyak TKI yang bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi dengan jam kerja yang panjang tanpa upah lembur yang layak¹³. Selain itu, beberapa TKI juga mengalami kekerasan fisik dan mental dari majikan mereka. Selain eksploitasi, Menurut Kurniawan, (2018) TKI juga menghadapi masalah dalam hal dokumen keimigrasian¹⁴. Banyak TKI yang berangkat ke Malaysia melalui jalur yang tidak resmi, sehingga mereka menjadi pekerja ilegal yang rentan terhadap deportasi dan penyalahgunaan. Kurangnya dokumen resmi juga menghalangi TKI untuk mendapatkan hak-hak dasar seperti perlindungan hukum dan akses ke layanan kesehatan¹⁵.

Peran agen tenaga kerja dalam merekrut dan menempatkan TKI juga sering menjadi masalah. Banyak agen yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ketidaktahuan calon TKI mengenai prosedur yang benar, sehingga mereka memungut biaya yang sangat tinggi dan memberikan informasi yang tidak akurat tentang kondisi kerja di Malaysia. Hal ini sering kali mengakibatkan TKI terjebak

¹¹ Susilo, A. (2020). Cultural Exchange Between Indonesia and Malaysia Through Migrant Workers. *Journal of Cultural Studies*, 12(2), 176-194.

¹² Human Rights Watch. (2020). "They Deceived Us at Every Step": Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to Malaysia

¹³ Amnesty International. (2019). Exploitation and Abuse of Migrant Workers in Malaysia. Amnesty International Reports.

¹⁴ Kurniawan, R. (2018). Challenges in Protecting Indonesian Migrant Workers in Malaysia. *Journal of Migration and Human Security*, 6(1), 56-75.

¹⁵ Suparno, D. (2020). Legal Framework for the Protection of Indonesian Migrant Workers. *Journal of Indonesian Law and Policy*, 15(1), 89-108.

dalam utang yang besar sebelum mereka mulai bekerja¹⁶. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Malaysia sangat diperlukan. Kedua negara harus bekerja sama untuk meningkatkan mekanisme perlindungan bagi TKI, termasuk melalui penguatan regulasi dan pengawasan terhadap agen tenaga kerja. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan TKI mengenai hak-hak mereka sebelum berangkat ke luar negeri¹⁷.

Perlindungan hukum bagi TKI di Malaysia juga perlu diperkuat. Saat ini, banyak TKI yang tidak mendapatkan akses yang memadai ke sistem peradilan karena berbagai kendala, termasuk bahasa dan biaya¹⁸. Pemerintah Indonesia perlu menyediakan layanan bantuan hukum yang lebih efektif bagi TKI yang menghadapi masalah hukum di Malaysia. Selain itu, perlu ada kerjasama dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yang berfokus pada perlindungan hak-hak pekerja migran.

Masalah kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam perlindungan TKI. Banyak TKI yang tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai di Malaysia. Hal ini disebabkan oleh status keimigrasian mereka yang tidak resmi atau karena mereka tidak terdaftar dalam sistem jaminan kesehatan. Kedua negara perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa semua TKI mendapatkan akses yang layak ke layanan kesehatan, termasuk melalui pendaftaran dalam program asuransi kesehatan yang terjangkau¹⁹.

Kesejahteraan sosial TKI juga harus menjadi fokus utama dalam kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Banyak TKI yang mengalami tekanan mental dan emosional akibat kondisi kerja yang berat dan jauh dari keluarga²⁰. Program-program dukungan sosial dan konseling perlu disediakan untuk membantu TKI mengatasi masalah-masalah ini. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa TKI

¹⁶ Sukanto, A. (2021). The Recruitment of Indonesian Migrant Workers: Issues and Challenges. *Asian Pacific Migration Journal*, 30(3), 255-273.

¹⁷ BNP2TKI. (2020). Laporan Kinerja BNP2TKI 2020. Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

¹⁸ Malaysian Bar Council. (2020). *Legal Issues Faced by Migrant Workers in Malaysia*. Kuala Lumpur: Malaysian Bar Council.

¹⁹ WHO. (2021). *Health and Migration: Ensuring Access to Health Services for Migrant Workers*. Geneva: World Health Organization.

²⁰ Indonesian Legal Aid Foundation. (2019). *Providing Legal Assistance to Migrant Workers*. Jakarta: Indonesian Legal Aid Foundation.

memiliki akses ke pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan mereka dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa depan.

Upaya untuk meningkatkan perlindungan TKI juga harus melibatkan komunitas TKI itu sendiri. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah perlu bekerja sama dengan komunitas TKI untuk mendengarkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dikembangkan dapat lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan TKI²¹. Selain itu, penting untuk mengembangkan mekanisme pelaporan yang efektif bagi TKI yang mengalami pelanggaran hak. Mekanisme ini harus mudah diakses dan memberikan perlindungan yang memadai bagi TKI yang melaporkan kasus-kasus pelanggaran. Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional juga dapat membantu meningkatkan standar perlindungan bagi TKI di Malaysia²².

Dalam konteks hubungan Indonesia dan Malaysia, pentingnya TKI tidak dapat diabaikan. Mereka memainkan peran krusial dalam mendukung perekonomian kedua negara melalui kontribusi mereka di berbagai sektor. Namun, masalah perlindungan yang dihadapi oleh TKI memerlukan perhatian serius dari kedua pemerintah. Kerjasama bilateral yang kuat dan komprehensif diperlukan untuk memastikan bahwa hak-hak TKI dilindungi dan kesejahteraan mereka terjamin. Melalui peningkatan regulasi, pengawasan yang ketat terhadap agen tenaga kerja, dan penyediaan layanan dukungan yang memadai, diharapkan perlindungan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran diatas, penulisan ini memiliki perumusan permasalahan berupa pertanyaan penelitian :

²¹ Suparno, D. (2020). Legal Framework for the Protection of Indonesian Migrant Workers. *Journal of Indonesian Law and Policy*, 15(1), 89-108

²² Human Rights Watch. (2020). "They Deceived Us at Every Step": Abuse of Cambodian Domestic Workers Migrating to Malaysia

Bagaimana bentuk dan efektivitas kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia pada periode 2020-2023 ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan migrasi, kondisi, perlindungan, serta tantangan yang dihadapi TKI di Malaysia, mengevaluasi peran lembaga, MoU, dan instrumen perlindungan, serta menilai implementasi kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dalam melindungi TKI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta rumusan masalah di atas, diharapkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis, penelitian ini berguna sebagai media untuk mengimplementasikan ilmu yang telah penulis dapat di semester-semester perkuliahan sebelumnya. Kemudian, penelitian ini berguna untuk melatih kemampuan meneliti dan menulis agar kedepannya dapat lebih terbiasa dengan penulisan ilmiah. Terakhir, penelitian ini memiliki kegunaan untuk membantu penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S-1) dalam program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nasional.
- b. Bagi Institusi Pendidikan penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan Hubungan Internasional dan juga bagi peneliti-peneliti yang ingin meneliti topik terkait. Sedangkan, bagi instansi pemerintahan penelitian ini berguna untuk menjadi bahan pertimbangan dalam membentuk dan menjalankan kebijakan yang lebih efektif.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini berfungsi untuk menambah wawasan terkait cara mengukur efektivitas suatu kerja sama serta dapat menjadi referensi maupun rujukan bacaan terhadap penelitian serupa

Fokus dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman dan pengetahuan tentang Hubungan Internasional melalui temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan. Dengan demikian, diharapkan tulisan ini akan memberikan kontribusi

positif dalam meningkatkan pemahaman dan pengalaman belajar selama kegiatan perkuliahan, serta memperkaya wawasan para pembaca mengenai isu-isu internasional yang relevan dalam konteks global.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah dengan pokok permasalahan pada Kebijakan Malaysia terhadap Imigran Ilegal Indonesia tahun 2018-2023, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Pada bab II ini penulis menjelaskan penelitian terdahulu yang berguna untuk melihat perbedaan dan kesamaan oleh peneliti sebelumnya mengenai bagaimana Kebijakan Malaysia terhadap Imigran Ilegal Indonesia, kerangka teori, kerangka pemikiran serta hipotesis untuk membantu proses penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan bagaimana metode yang dilakukan, lalu analisis data serta aspek dimensi dan parameter yang ada dalam penulisan penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bagian keempat ini, penulis menguraikan cara atau proses bagaimana hasil penelitian yang dilakukan terhadap Kebijakan Malaysia dalam terhadap Imigran Ilegal Indonesia tahun 2018-2023.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian kelima ini, penulis menyimpulkan bagaimana yang diteliti dan memberikan rekomendasi untuk penelitian ini.